

Kehancuran Golongan Komunis di Indonesia

Abstrak

Komunisme pernah menjadi aliran politik yang sangat berpengaruh di Indonesia. Tiga peristiwa penting dalam sejarah Indonesia dikaitkan dengannya, yakni Peristiwa 1926, 1948 dan 1965. Namun pokok bahasan tulisan ini adalah pada proses kehancuran mereka pada tahun 1966. Pemerintah Orde Baru berhasil menguburnya hingga sekarang, meskipun sudah tidak berkuasa lagi sejak 21 Mei 1998.

Oleh: Abdul Syukur (Dosen Jurusan Sejarah UNJ)

Komunisme berasal dari pemikiran Karl Heinrich Marx, seorang ilmuwan Jerman yang hidup pada abad ke-19 (181-1883). Ajarannya dikembangkan oleh Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin untuk membangkitkan revolusi Rusia untuk menumbangkan kekaisaran Rusia pada tahun 1917. Di atas reruntuhan Kekaisaran Rusia itulah Lenin membangun Uni Soviet berdasarkan ideologi Komunisme yang merupakan perpaduan antara pemikiran Marx dengan pengalaman bangsa Rusia.

Untuk menyebarkan Komunisme ke seluruh dunia, Lenin membentuk Comintern (Komunisme Internasional). Tujuannya adalah membangkitkan revolusi komunis di seluruh dunia untuk menghancurkan kapitalisme, kolonialisme dan imperialisme. Di antara utusan resmi Comintern adalah Tan Malaka dari Hindia Belanda (Indonesia) yang bertugas membangkitkan revolusi komunis di Asia Tenggara, khususnya Hindia Belanda. Namun ia bukanlah orang pertama yang menyebarkan komunisme di Hindia Belanda.

Penyebarkan komunisme pertama di Hindia Belanda adalah Hendricus Josephus Fransiscus Marie Sneevliet (1883-1942). Tokoh intelektual Marxis ini menjadi ketua persatuan buruh kereta api dan term di negeri Belanda pada tahun 1909. Empat tahun kemudian menetap di Indonesia yang saat itu masih menjadi jajahan Belanda. Di negeri jajahan ini, Sneevliet menghimpun buruh kereta api dan trem. Pada tahun 1914 ia

mendirikan Indische Sociaal Democratische Partij (ISDV) dan banyak mempengaruhi kader-kader terbaik Sarekat Islam di Semarang, Jawa Tengah.¹ Akibatnya SI pecah menjadi dua, SI Merah yang dipengaruhi Sneevliet dan SI Putih yang menolak pengaruh Sneevliet. Pada tahun 1918 Sneevliet kembali ke negeri Belanda karena diusir oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Kepergian Sneevliet tidak membuat komunisme lenyap di Hindia Belanda. Kepemimpinannya diambil alih para kader terbaiknya, Semaun dan Dharsono. Pada tahun 1921 keduanya mendirikan Perserikatan Komunis Hindia Timur. Mayoritas tokoh dan anggotanya berasal dari SI Merah. Mereka segera mengubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia seiring dengan kebangkitan nasionalisme Indonesia. Pengaruh mereka sangat kuat dalam organisasi buruh kereta api dan trem. Saat itu kereta api dan trem merupakan alat transportasi paling modern. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menghancurkan PKI setelah mereka melancarkan pemberontakan pada tahun 1926-1927. Banyak tokoh PKI yang dibuang ke Boven Digul, Irian Barat (Irian Jaya dan sekarang Papua Barat).

Bangkitnya Golongan Komunis

Sejak tahun 1927 PKI menjadi partai terlarang. Mereka bangkit lagi setelah kemerdekaan Republik

¹ Arnold C. Brackman, *Indonesian Communism : A History*, (New York : Frederick Praeger, 1964),h 7-15

Indonesia. Pada bulan Oktober 1945 pemerintah Indonesia mengumumkan pemberlakuan sistem multipartai sehingga berdirilah partai-partai politik berdasarkan ideologinya. Secara garis besar ada lima aliran dalam pemikiran politik di Indonesia sepanjang tahun 1945-1965 yaitu Islamisme, Komunisme, Nasionalisme Radikal, Sosialisme Demokrat, dan Tradisionalisme Jawa.²

Pada 11 Agustus 1948 Kepala Perwakilan RI di Praha-Chekoslovakia Suripno kembali ke Indonesia. Ia membawa serta sekretarisnya yang bernama Soeparto alias Muso, seorang tokoh komunis yang melarikan diri ke Uni Soviet setelah kegagalan pemberontakan komunis 1926 di Banten, Jawa Barat.³ Selama di pengasingan, Muso menjadi salah satu tokoh komunisme internasional yang berpusat di Uni Soviet. Posisinya inilah yang membuatnya dapat mempengaruhi pimpinan PKI agar menerapkan garis keras dalam perjuangannya. Dalam konferensi PKI pada 26-27 Agustus 1948 ia diangkat sebagai Sekjen Politbiro PKI. Di bawah kepemimpinannya jumlah anggota PKI segera membesar dari 3000 menjadi 30.000 setelah Muso berhasil menggabungkan PKI dengan Partai Sosialis Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), dan Partai Buruh Indonesia.⁴

Mereka melakukan penentangannya secara terbuka terhadap pemerintah Republik Indonesia terutama dalam menghadapi Belanda. Gerakan mereka berpusat di kota Madiun, Jawa Timur. Pada 19 September 1948 mereka

mendirikan negara komunis Soviet. Namun pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta berhasil menggagalkannya. Untuk kedua kalinya PKI mengalami kehancuran setelah gagal melancarkan pemberontakan.

Sementara itu Peristiwa Madiun menyebabkan terjadinya percepatan regenerasi kepemimpinan PKI dari generasi tua kepada generasi mudanya seperti D.N. Aidit, Nyoto, Sudisman dan Sudisman. Mereka adalah pemimpin utama PKI pada tahun 1950-an. Di bawah kepemimpinan Dja'far Noer Aidit (terkadang D.N. dibaca pula Dipa Nusantara), PKI berhasil menjadi partai terbesar keempat dalam Pemilu 1955.⁵ Perolehan suaranya berada di bawah PNI, Masyumi, dan Partai NU.

Pengaruh PKI di Indonesia semakin kuat setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 dan menjalankan politik luar negeri yang agresif dalam menentang Nekolim (New Kolonialisme dan Imperialisme) sepanjang awal tahun 1960-an. Soekarno sangat bergantung terhadap dukungan massa maupun jaringan internasional PKI untuk menghadapi Negara-negara Nekolim. Hanya TNI Angkatan Darat yang menjadi penghalang utama PKI untuk memperbesar pengaruhnya di Indonesia.

Pembunuhan Pimpinan Angkatan Darat.

Pada tanggal 1 Oktober 1965 sekitar pukul 02.30-04.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) di Jakarta telah terjadi serangkaian penculikan dan pembunuhan terhadap beberapa perwira tinggi Angkatan Darat yang memegang jabatan penting di MBAD (Markas Besar Angkatan Darat). Mereka itu

² Herbert Feith dan Lance Castles, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965* (Jakarta: LP3ES, 1988), h. liii-lxvii.

³ Himawan Soetanto, *Madiun Dari Republik ke Republik*, (Jakarta: KATA, 2008), h. 75.

⁴ Ann Swift "The Road to Madiun" *The Indonesian Communist Uprising of 1948*. Cornell Modern Indonesian Project. Southeast Asia Program. Cornell University, New York 1989, h. 57-59

⁵ Jacques Lerclerc, "Aidit Dan Partai Pada Tahun 1950" dalam *Prisma* (no. 7, tahun 1982), h. 65-71

adalah : Letjen. Ahmad Yani (Men/Pangad), Mayjen. R. Soeprapto (Deputy II Men/Pangad), Mayjen. Harjono Mas Tirtodarmo (Deputy III Men/Pangad), Mayjen. S.Parman (Asisten I Men/Pangad), Brigjen. D.I. Panjaitan (Asisten VI Men/Pangad) dan Brigjen. Soetojo Siswomihardjo (Inspektur Kehakiman AD). Pada peristiwa ini Jenderal A.H. Nasution (Menhankam) berhasil lolos dari usaha penculikan. Tetapi putrinya yang bernama Ade Irma Suryani dan baru berumur 5 tahun serta ajudannya yang bernama Lettu. Piere Andreas Tendean meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.⁶ Nasution baru keluar dari persembunyian dan bergabung dengan pasukan Kostrad (Kmando Strategis Angkatan Darat) yang dipimpin oleh Mayjen. Soeharto pada pukul 18.00 WIB.⁷ Operasi penculikan ini dilakukan oleh pasukan resimen Cakrabirawa.⁸

Peristiwa penculikan terhadap para perwira tinggi Angkatan Darat ini disampaikan oleh Mashuri, SH kepada Panglima Kostrad Mayjen Soeharto pada pukul 06.00. Mashuri adalah sekretaris RT (Rukun Tetangga) dimana Soeharto tinggal dan ia mendapat kabar penculikan ini dari Kapten Brimob Hamid Sjamsuddin. Setelah mendapat pemberitahuan dari tetangganya ini, Soeharto segera berangkat ke kantornya, Markas Kostrad yang terletak di jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Ia sampai di kantornya sekitar pukul 06.30 WIB.⁹ Sebenarnya berita tentang apa yang terjadi saat itu masih simpang siur. Soeharto untuk sementara

mengambil-alih komando di Angkatan Darat. Jabatannya selaku Panglima Kostrad menjadikan ia sebagai perwira paling tinggi jabatannya. Pengambil-alihan ini disetujui oleh para perwira Angkatan Darat.

Pada saat yang bersamaan, H. Subchan ZE, salah seorang pemimpin partai NU datang ke kantor Kodam V Jakarta. Ia menemui Mayjen . Umar Wirahadikusuma yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kodam V Jakarta.¹⁰ Subchan meminta bantuan senjata kepada Umar untuk menghancurkan PKI, karena ia yakin peristiwa penculikan ini didalangi oleh PKI (Partai Komunis Indonesia). Hari itu juga Subchan mengadakan kontak terutama dengan partai dan ormas Islam lainnya untuk penggalangan massa guna membantu Angkatan Darat dalam menghancurkan PKI. Hal serupa juga dilakukan oleh Letkol. Prodjokusumo di lingkungan intern Muhammadiyah. Ia membentuk Kokam (Korps Komando Angkatan Muda Muhammadiyah).¹¹

Tindakan penggalangan massa yang dilakukan golongan Islam ini cukup berani karena kabar penculikan sendiri masih simpang siur. Kesimpangsiuran ini segera terjawab dengan adanya pengumuman resmi dari Letkol. Untung, komandan pleton Cakrabirawa. Pada pukul 07.20 WIB melalui RRI (Radio Republik Indonesia) pusat, ia memaklumkan dirinya sebagai pemimpin Gerakan 30 September yang telah melakukan penculikan terhadap beberapa perwira tinggi Angkatan Darat.¹²

⁶ Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, *Tragedi nasional Percobaan Kup G 30 S/PKI Di Indonesia* (Jakarta : Intermassa, 1990), cet. II, h. 16-23.

⁷ G. Dwipayana dan Nazarudin Sjamsuddin, *Jejak Langkah Pak Harto : 1 Oktober 1965-27 Maret 1968*, (Jakarta : Lamtoro Gung Persada, 1991), h. 5.

⁸ Resimen Cakrabirawa didirikan pada tanggal 14 Mei 1962, sebagai pasukan Khusus pengawal Presiden Soekarno. Kekuatan Resimen Cakrabirawa terdiri dari satu battalion Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian komandan tertingginya adalah Brigjen. Sobur. Lihat otobiografi M. Panggabean, *Berjuang Dan Mengabdikan*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1993), h. 355

⁹O.G. Roeder, *The Smiling General: President Soeharto of Indonesia*, (Jakarta : Gunung Agung, 1969), h. 11.

¹⁰ Umar Wirahadi kusuma, "Tenang, Sabar, Dan Ulet", dalam G. Dwipayana dan Nazarudin Sjamsuddin, *Diantara Para Sahabat : 70 Tahun Pak Harto*, (Jakarta : Lamtoro Gung Pesada, 1993), h. 28.

¹¹ M.T. Arifin, *Muhammadiyah Potret Yang Berubah*, (Surakarta : Institut Gelanggang Pemikiran Filsafat Sosial Dan Budaya Kependidikan, 1990), h. 304.

¹² Sebagian isi pidato Letkol Untung dapat dilihat dalam *Antara*, 1 Oktober 1965.

Pada pukul 13.00 WIB, Letkol. Untung kembali memberikan pengumuman yaitu tentang demisionernya Kabinet Dwikora dan pembentukan Dewan Revolusi Indonesia.¹³ Pengumuman terakhir ini memperjelas tujuan dari gerakan 30 September yaitu mengambil-alih kekuasaan di Indonesia. Para perwira Angkatan Darat di Kostrad memutuskan untuk menghadapi pasukan pemberontak tersebut. Operasi penumpasan ini dipimpin oleh Pangkostrad Mayjen. Soeharto. Pada pukul 18.30 WIB, ia memerintahkan Komandan RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) Kolonel Sarwo Edhi Wibowo untuk merebut kantor RRI pusat dan gedung telekomunikasi yang telah dikuasai oleh para pemberontak. RPKAD, pasukan elit TNI Angkatan Darat, ini dapat menguasai kedua gedung ini dalam waktu hanya beberapa jam. Sementara itu pasukan pemberontak mundur ke pangkalan udara Halim Perdana Kusumah yang terletak di Jakarta Timur. Halim ternyata merupakan pusat kekuatan militer pemberontak. Karena Halim berada di bawah kekuasaan Angkatan Udara.¹⁴

Pangkostrad Mayjen. Soeharto, segera memrintahkan pasukan RPKAD untuk mengepung daerah Halim. Dalam pengepungan ini RPKAD dibantu oleh batalion Para Kujang dari Divisi Siliwangi di Jawa Barat. Pengepungan ini sempat menegangkan hubungan antara Angkatan Udara dan Angkatan Darat. Ketegangan ini tidak sampai pecah menjadi konflik senjata sebab pada tanggal 3 Oktober 1965 pukul 01.30 WIB, Presiden Soekarno memerintahkan pasukan pemberontak yang berada di Halim agar menyerahkan diri. Dengan demikian kekuatan militer

pemberontak di Jakarta dapat dilumpuhkan.

Sementara Mayjen. Soeharto sibuk memimpin operasi penumpasan secara militer terhadap para pemberontak, maka Mayjen. Sutjipto, ketua G V KOTI (Komando Tertinggi)¹⁵ bekerja sama dengan Subchan mengundang semua pimpinan partai politik di Jakarta. Pertemuan ini diadakan pada tanggal 2 Oktober 1965 di markas Kostrad. Dalam pertemuan ini hanya PKI dan Parkindo (Partai Kristen Indonesia) yang tidak hadir. Pada pertemuan ini Mayjen. Soejipto mendesak para pimpinan partai untuk menentukan pilihan apakah memilih komunis atau Angkatan Darat. Para pimpinan partai akhirnya memilih untuk bergabung bersama Angkatan Darat dalam menghadapi PKI. Realisasi dari dukungan para pimpinan partai adalah dengan membentuk Badan Koordinasi Pengganyangan kontra Revolusioner Gerakan 30 September. Badan ini nantinya diubah menjadi KAP Gestapu Kesatuan Aksi (Pengganyangan Gerakan September Tiga Puluh) yang berfungsi sebagai pusat penggalangan massa guna menghadapi PKI. Tetapi pembentukan badan ini tidak diumumkan menunggu perkembangan dari pengepungan di pangkalan udara Halim Perdana Kusumah. Subchan yang diangkat sebagai koordinator segera menjadikan rumahnya sebagai markas kekuatan anti komunis.

Pada tanggal 4 Oktober 1965 para pemimpin partai dan ormas dari berbagai unsur mengadakan ceramah umum yang bertempat di Taman Sunda Kelapa, Jakarta Pusat. Para pembicaranya antara lain H.M. Subchan Z.E, dan Yahya Ubaid (keduanya dari NU),

¹³G. Dwipayana dan Nazarudin Sjamsuddin, "Jejak " *op. cit.*, h. 5

¹⁴ Pada tahun 1999 terbit karya Aristides Kattopo, *Menyingkap Kabut Halim 1965* (Jakarta: Sinar Harapan, 1999) yang menepis hubungan antara TNI Angkatan Udara dan G30S/PKI.

¹⁵ KOTI adalah lembaga tertinggi dalam struktur operasi gabungan dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia. KOTI dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno selaku Panglima tertinggi. Jabatan G v khusus mengurus bidang politik. Lihat Kusumah Hadiningrat, *Sejarah Operasi-Operasi Gabungan Dalam Rangka Dwikora*. (Jakarta : De . Hankam, 1971), h. 40-45.

Projokusumo (Muhammadiyah), Syeh Marhaban (PSII), Tejomulyo (Katolik) dan lain-lain.¹⁶ Acara ini diakhiri dengan pernyataan bersama mengutuk tindakan kudeta 30 September yang telah memakan korban 6 Jenderal. Pernyataan ini secara tegas menyatakan bahwa PKI sebagai dalang kudeta oleh karenanya PKI dan ormas-ormasnya harus segera dibubarkan.¹⁷ Pada saat inilah dibentuk KAP-Gestapu dengan Ketua : Subchan Z.E, Sekretaris : Harry Tjan Silalahi (Katolik), Ketua Pengerahan Massa : Lukman Harun (Muhammadiyah), Keamanan : Erwin Baharudin (IPKI), Keuangan : Syarifuddin Harahap (HMI), Anggota : Agus Sudono, Ismail Hasan SH, Yahya Ubaid SH, Llem Bian Kie, Mar'i Muhammad, Syarifudin Siregar Pahu, Ramli Harahap, Husain Umar, dan lain-lain. Dalam perkembangannya KAP Gestapu membentuk semacam presidium yang terdiri dari unsur-unsur NU, Partai Katolik, Parkindo, IPKI, Perti, Muhammadiyah, Gasbiindo, dan Soksi.¹⁸ Tampilnya Subchan memimpin KAP-Gestapu, menurut Harry Tjan Silalahi karena dia adalah tokoh partai NU yang disegani dan populer di kalangan kaum muda.¹⁹

Pengumuman pendirian KAP-Gestapu ini dengan sengaja didahului beberapa jam oleh acara pengangkatan jenazah para perwira tinggi Angkatan Darat yang menjadi korban kudeta. Pengangkatannya dilakukan pada pukul 13.00 WIB dan langsung dibawa ke MBAD (Markas Besar Angkatan Darat) yang terletak di Jakarta Pusat. Jenazah baru di kebumikan pada esok harinya tanggal 5 Oktober 1965.

¹⁶ Catatan kaki no. 6 dari Arief Mudatsir Mandan, "Subchan Z.E. dalam Konstelasi Politik Pasca 1965, *Prisma No. Khusus* (1991), h. 202.

¹⁷ Isi pernyataan terdiri dari 11 point, isi lengkapnya lihat .H. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas jilid VI*, (Jakarta : Masagung, 1989) cet II, h. 274-275

¹⁸ Arief Mudatsir Mandan, loc.cit.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ansor adalah organisasi kepemudaan yang berafiliasi ke partai NU.

Kondisi jenazah yang sudah dalam keadaan rusak ini ditambah dengan agitasi keagamaan mampu membangkitkan sikap anti komunis yang luarbiasa. Pada tanggal 5 Oktober 1965 jalan-jalan yang menjadi rute penguburan jenazah para perwira ini di penuhi oleh rakyat Indonesia, terutama masyarakat kota Jakarta. Tiga hari setelah acara penguburan (8 Oktober), beberapa ribu pemuda Ansor²⁰ membakar habis markas Besar PKI di Kramat Raya (Jakarta Pusat).²¹ Aksi kekerasan ini mengawali kegiatan-kegiatan demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya.

Sikap Presiden Soekarno yang tidak mau mengakui PKI sebagai dalang kudeta memperbesar gelombang demonstrasi menuntut pembubaran PKI. Para pemimpin KAP-Gestapu memecah para anggotanya menjadi kesatuan-kesatuan yang lebih kecil berdasarkan profesi. Pada tanggal 25 Oktober 1965 berdirilah KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia).²² Syarif Thayeb, "Tegas, Konsisten, Tetapi Luwes"

Kemudian berturut-turut berdiri KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia), KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia) dan KAWI (Kesatuan Aksi Wanita Indonesia). Ormas-ormas Islam terlibat banyak dalam pendirian kelompok Kesatuan Aksi ini, misalnya HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)²³ menjadi unsur paling dominan di dalam KAMI, sedangkan PII (Pelajar Islam Indonesia),²⁴ Ansor, dan Pemuda Muhammadiyah banyak terlibat di dalam KAPPI. Anggota KAHMI (Keluarga Alumni HMI) banyak

²⁰ Ansor adalah organisasi kepemudaan yang berafiliasi ke partai NU.

²¹ O.G Roeder, *op. cit.*, h. 62. M. Panggabean, *Berjuang Dan Mengabdikan* (Jakarta : Sinar Harapan, 1993), h. 340.

²² Syarif Thayeb, "Tegas, Konsisten, Tetapi Luwes", dalam G.Dwipayana, *Diantara... op. cit.*, h. 691

²³ HMI adalah organisasi kemahasiswaan yang tidak berafiliasi kepada partai politik manapun. Tetapi secara ideologis HMI lebih dekat kepada Masyumi dibanding dengan partai NU, Peri atau PSII.

²⁴ PII adalah organisasi kemahasiswaan yang berafiliasi ke partai Masyumi

terlibat dalam KASI. Diantara kelompok Kesatuan Aksi ini KAMI adalah kelompok yang paling besar dan menjadi pelopor utama tidak hanya dalam rangka menghancurkan PKI tetapi juga menyingkirkan Presiden Soekarno.

Ada semacam pembagian tugas yang tidak tertulis antara kelompok KAP-Gestapu dengan Kesatuan Aksi. Jika KAP-Gestapu mengadakan tekanan kepada pemerintah melalui jalur formal, yaitu melalui DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong). Maka kelompok Kesatuan Aksi menggunakan jalur non formal. Tetapi jalur formal yang dilakukan KAP-Gestapu tidak efektif. Sehingga kelompok Kesatuan Aksi terus menerus mengadakan aksi demonstrasi menuntut pembubaran PKI. Pada periode inilah dikenal istilah "parlemen jalanan". Klimaks dari demonstrasi terjadi pada tanggal 10 Januari 1966 dimana setelah mengadakan seminar di fakultas Ekonomi UI, kelompok Kesatuan Aksi mengadakan aksi demonstrasi besar-besaran didepan Istana Negara. Dalam demonstrasi ini disampaikan tiga tuntutan. Pertama, pembubaran PKI, kedua pembersihan aparaturnegara dari unsur-unsur PKI, dan ketiga perbaikan ekonomi.²⁵

Pemerintah menganggap serius aksi demonstrasi ini, sehingga pada tanggal 15 Januari 1966 Presiden Soekarno memanggil semua Menteri Kabinet Dwikora untuk mengadakan rapat darurat di Istana Bogor. Dalam rapat ini Presiden Soekarno mendirikan instruksi untuk membentuk Barisan Pendukung Soekarno (BPS). Pembentukan BPS secara langsung dianggap sebagai tukang buat kerusuhan. Tindakan keras ini menambah kebencian kesatuan aksi kepada Presiden Soekarno. Sehingga tema demonstrasi

merekapun bergeser dari anti-PKI menjadi anti-Soekarno. Selama akhir bulan Januari sampai awal Maret 1966 sering terjadi bentrokan fisik antara BPS yang didukung oleh Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian dengan KAMI yang didukung oleh Angkatan Darat, terutama RPKAD.²⁶ Pasukan RPKAD dibawah pimpinan Kolonel Sarwo Edie Wibowo memberi perlindungan penuh kepada KAMI. RPKAD menempatkan pasukan pansernya di UI yang telah menjadi markas KAMI.²⁷ Tetapi konflik senjata antar pasukan Angkatan Bersenjata tidak sampai terjadi. Situasi di Jakarta semakin genting setelah Presiden Soekarno pada tanggal 24 Januari 1966 memutuskan untuk membubarkan KAMI.²⁸ Para pimpinan partai ditekan untuk menandatangani surat keputusan tentang pembubaran KAMI.

Perkembangan di Jakarta mempunyai pengaruh kuat ke daerah-daerah. Aksi tuntutan pembubaran PKI diikuti dengan pembunuhan massal para kader maupun simpatisan PKI. Golongan Islam memegang peranan penting dalam pembunuhan tersebut. Sehingga daerah-daerah dimana posisi golongan Islam kuat, maka PKI dengan cepat dihancurkan. Para Panglima daerah memanfaatkan sikap anti komunis golongan Islam, seperti yang dilakukan oleh Mayjen. Ishak Djuarsa di Aceh dan Brigjen. Sarwo Edie Wibowo di Medan. Kedua panglima ini menggalang massa Islam untuk menghancurkan PKI dan PNI yang sebelumnya dikenal mempunyai hubungan dekat dengan PKI.

Proses penghancuran PKI di Pulau Jawa, terutama daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, lebih keras lagi. Sebab di dua wilayah ini PKI memiliki basis massa yang sama kuat. Di Jawa Timur anggota NU

²⁵ R.Z.,Leirissa, *op. cit.*, h. 344. G. Dwipayana, "Jejak ..." *op. cit.*, h. 39.

²⁶ Cristiano Wibisono, *Aksi-Aksi Tritura*, (Semarang : Yayasan Management Informasi, 1980), cet II, h. 32-35.

²⁷ R.Z.Leirissa, *op.cit.*, h. 348.

²⁸ G. Dwipayana, "Jejak ..." *op. cit.*, h. 47.

memegang peranan dominan dalam menghancurkan PKI. Sementara di Jawa Tengah, penghancuran PKI mendapat bantuan dari pasukan RPKAD. Tetapi angora NU tetap memegang peranan di dalamnya. Di wilayah Jawa Barat, pengaruh PKI sangat kecil. Dan panglima daerahnya, Mayjen. Ibrahim Adje telah lama membekukan aktifitas PKI beserta ormas-ormasnya di Jawa Barat. Proses penghancuran PKI berlangsung dari bulan Oktober sampai Desember 1965.

Memasuki tahun 1966, kekuatan PKI praktis telah mengalami kelumpuhan. Pada 12 Maret 1966 Panglima Kostrad / Panglima Kopkamtib Mayjen Soeharto setelah mendapatkan Surat Perintah 11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno langsung membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Tindakannya mendapat dukungan luas dari kekuatan sipil antikomunis yang berada di luar maupun dalam parlemen.

Pada 5 Juli 1966 pimpinan parlemen yang saat itu dipimpin Jenderal Abdul Haris Nasution, menerbitkan TAP MPRS No: XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxis-Leninisme. Sejak itu PKI beserta ormas-ormasnya menjadi organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Pemerintah Orde Baru selama 32 tahun menjalankan TAP MPRS NO. XXV secara konsisten sehingga menutup ruang gerak golongan komunis untuk bangkit kembali. Pada tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001) pernah mencoba untuk menekan MPR agar mencabut TAP MPRS NO. XXV. Namun usahanya mengalami kegagalan karena mendapat tantangan luas dari seluruh kekuatan antikomunis di Indonesia, baik yang berada di dalam maupun di luar MPR.

Pada 22 Juli 2001 Presiden Abdurrahman Wahid menerbitkan Maklumat Presiden yang berisi

pembubaran parlemen (MPR dan DPR). Keesokan harinya giliran pimpinan MPR yang memecat Abdurrahman Wahid dari jabatan Presiden. Ia digantikan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri hingga tahun 2004. Berdasarkan Pemilu Presiden 2004, Megawati digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Kedua Presiden RI ini mempertegas dukungannya terhadap pemberlakuan TAP MPR NO. XXV sehingga menutup rapat kembali bangkitnya komunisme di Indonesia.

Kesimpulan

Hingga tahun 1966 PKI telah mengalami tiga kali kehancuran, yakni pada tahun 1927, 1948, dan 1966. Namun PKI selalu dapat bangkit kembali berkat kepiawaian pemimpin mudanya seperti yang terjadi pada tahun 1945 dan 1950-an. Aidit adalah tokoh PKI paling berhasil dalam membesarkan partainya maupun memperbesar pengaruh golongan komunis di Indonesia. Di bawah pengaruhnya, Presiden Soekarno mengeluarkan Indonesia dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah gagal mendapat dukungan PBB untuk menggagalkan rencana Inggris membentuk negara federasi Malaysia. Di samping itu juga, Aidit berhasil mempengaruhi Presiden Soekarno untuk membentuk poros Jakarta - Peking.

Awal tahun 1960-an merupakan puncak kejayaan PKI di Indonesia. Namun mereka justeru mengalami kehancuran pada saat sedang berada di puncak kejayaannya. Jenderal Soeharto dan Jenderal Abdul Haris Nasution adalah dua tokoh utama dalam penghancuran golongan komunis di Indonesia. Namun golongan komunis tidak dapat bangkit lagi setelah kehancurannya pada tahun 1966 karena Presiden Soeharto selama berkuasa selama 32 tahun sangat konsistensi dalam menjalankan TAP MPR NO. XXV.

Daftar Pustaka

- Antara, 1 Oktober 1965. Arifin, M.T. 1990. *Muhammadiyah Potret Yang Berubah*, Surakarta : Institut Gelanggang Pemikiran Filsafat Sosial Dan Budaya Kependidikan. Brackman, Arnold C. 1964. *Indonesian Communism : A History*, New York : Frederick Preager.
- Dwipayana, G. dan Nazarudin Sjamsuddin, 1991, *Jejak Langkah Pak Harto : 1 Oktober 1965-27 Maret 1968*, Jakarta : Lamtoro Gung Persada.
- Feith, Herbert dan Lance Castles, 1988 *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES.
- Kattopo, Aristides. 1999. *Menyingkap Kabut Halim 1966*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Kusumah Hadiningrat, *Kusumah, 1971 Sejarah Operasi-Operasi Gabungan Dalam Rangka Dwikora*. (Jakarta : De . Hankam.
- Leirissa, R.Z., 1993. *Jenderal Maraden Panggabean Berjuang Dan Mengabdikan*, Jakarta : Sinar Harapan.
- Lerclerc, Jacques “Aidit Dan Partai Pada Tahun 1950” dalam Prisma no. 7, tahun 1982.
- Mandan, Arief Mudatsir, “Subchan Z.E. dalam Konstelasi Politik Pasca 1965, *Prisma No. Khusus* 1991
- Nasution, Abdul Haris, 1989. *Memenuhi Panggilan Tugas jilid VI*, Jakarta : Masagung.
- Notosusanto, Nugroho dan Ismail Saleh, 1990, *Tragedi nasional Percobaan Kup G 30 S/PKI Di Indonesia*, Jakarta :
- Intermassa.
- Roeder, O.G. 1969, *The Smiling General: President Soeharto of Indonesia*, (Jakarta : Gunung Agung.
- Soetanto, Himawan. 2007, *Madiun Dari Republik ke Republik*, Jakarta: KATA.
- Swift, Ann, “The Road to Madiun” The Indonesian Communist Uprising of 1948. Cornell Modern Indonesian Project. Southeast Asia Program. Cornell University, New York 1989.
- Thayeb, Sjarif, “Tegas, Konsisten, Tetapi Luwes”, dalam G.Dwipayana, 1993.
- Wibisono, Cristiano, 1980. *Aksi-Aksi Tritura*, Semarang : Yayasan Management Informasi.
- Wirahadikusuma, Umar “Tenang, Sabar, Dan Ulet”, dalam G Dwipayana dan Nazarudin Sjamsuddin, 1993 *Djend. soeharto: Diantara Para Sahabat : 70 Tahun Pak Harto*, Jakarta : Lamtoro Gung Persada